



## Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2019-2021

Feby Cahyo Kumolo<sup>1</sup>, Dwi Suhartini<sup>2</sup>, Wahyu Helmy Dimayanti Sukiswo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: [19013010105@student.upnjatim.ac.id](mailto:19013010105@student.upnjatim.ac.id), [dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id](mailto:dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id),  
[wahyu.helmy.ak@upnjatim.ac.id](mailto:wahyu.helmy.ak@upnjatim.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-02  <b>Keywords:</b> <i>Financial Performance</i> <i>Local Government;</i> <i>General Allocation Funds;</i> <i>Local Revenue;</i> <i>Special Allocation Funds.</i>	This study aims to test and prove the effect of local revenue, special allocation funds, and general allocation funds on the financial performance of city or district governments in Central Java Province. This research topic is important to study because it is able to measure the performance of local governments in managing regional finances. This study uses quantitative methods with a total of 105 data from 35 samples of city or district governments in Central Java Province 2019 - 2021. The data analysis technique used is a structural equation model (SEM) with partial least square (PLS) analysis with the SmartPLS tool. The results prove that local revenue and special allocation funds are unable to contribute to the financial performance of local governments due to unbalanced expenditure budgets and revenue budgets. Local governments must conduct an evaluation each year so that the expenditure and revenue budgets can be balanced, while the general allocation fund is able to contribute to the financial performance of local governments because local governments have full authority in using the budget allocation.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Dana Alokasi Khusus;</i> <i>Dana Alokasi Umum;</i> <i>Kinerja Keuangan</i> <i>Pemerintah daerah;</i> <i>Pendapatan Asli Daerah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Topik penelitian ini penting untuk dikaji karena mampu mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah data sebanyak 105 dari 35 sampel pemerintah kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah <i>structural equation model (SEM)</i> dengan analisis <i>partial least square (PLS)</i> dengan alat SmartPLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan anggaran belanja dan anggaran pendapatan yang tidak berimbang. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi tiap tahunnya agar anggaran belanja dan pendapatan bisa berimbang, sedangkan dana alokasi umum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan sepenuhnya dalam menggunakan alokasi anggaran tersebut.

### I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia pada masa orde baru menganut sistem sentralisasi. Nuradhawati (2019) menjelaskan bahwa sistem sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada yang berada di posisi puncak dalam struktur organisasi (pemerintah pusat). Pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan dalam mengatur daerahnya. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia, pembangunan hanya terjadi di sekitar pusat pemerintahan sedangkan daerah lainnya tidak mendapatkan pembangunan. Masyarakat di daerah yang mengalami ketimpangan terus melakukan penekanan sampai pada akhirnya pemerintah pusat menerapkan sistem desentra-

lisasi dan membuat kebijakan yaitu otonomi daerah.

Landasan hukum otonomi daerah pada saat itu adalah Undang Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa daerah diberi kekuasaan untuk melakukan otonomi daerah. Tahun 2004 landasan hukum otonomi daerah diperbarui menjadi Undang Undang No 33 Tahun (2004) dan pada tahun 2014 mengalami pembaruan menjadi Undang Undang No 23 (2014). Undang Undang No 23 (2014) tentang otonomi daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang lebih dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengen-

dalian, dan juga evaluasi. Nurkhayat (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing masing daerah bisa menciptakan sumber sumber penerimaannya sendiri.

Pemerintah daerah dalam menyusun anggaran juga harus memperhatikan penghasilan daerahnya sendiri atau yang biasa disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD). Undang Undang No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan undang undang yang berlaku. Pendapatan lain yang bisa digunakan dalam anggaran belanja daerah adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan ini merupakan dana bantuan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah untuk dapat menyamaratakan kemampuan keuangan tiap daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerahnya. Dana perimbangan bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan juga belanja negara (APBN). Undang undang menjelaskan bahwa terdapat tiga macam dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Undang Undang No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendaparan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembanguna nasional. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah juga bisa menjadi bahan evaluasi agar kedepannya pemerintah daerah bisa membenahi mengenai sistem kerjanya. Alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penerapan rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Rasio yang bisa digunakan dalam menganalisis kinerja adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas.

Isna (2022) menjelaskan bahwa jawa tengah sebagai provinsi terbesar ketiga di Pulau Jawa pada tahun 2022 dinobatkan sebagai provinsi termiskin kedua di pulau jawa setelah Jogjakarta.

Provinsi yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota ini memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) yang rendah.



**Gambar 1.** Diagram Efisiensi Keuangan Daerah

Gambar 1 menunjukkan mengenai efisiensi keuangan pemerintah daerah beberapa kota atau kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Diagram tersebut menggambarkan dalam rentang waktu tiga tahun (2019, 2020, 2021) masih banyak pemerintah daerah yang mencatatkan nilai dibawah satu yang artinya banyak pemerintah daerah belum membelanjakan uangnya dengan efektif. Nilai yang baik bagi pemerintah daerah adalah dibawah satu yang mana menandakan bahwa pemerintah daerah sudah membelanjakan dengan efektif. Melihat kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hak setiap masyarakat daerah tersebut untuk memastikan bahwa uang yang sudah mereka bayarkan digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang disampaikan oleh Jensen & Meckling (1976), teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal*. *Principal* yang dimaksud adalah masyarakat dan agen yang dimaksud adalah pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Machmud & Radjak (2018) & (Verawaty et al 2020) yang masih memiliki perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan (Machmud & Radjak 2018) menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh tidak signifikan pada kinerja keuangan daerah sedangkan DAK memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah penelitian ini dilakukan di kabupaten Gorontalo. Penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty et al., 2020) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah sedangkan DAK dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah penelitian dilakukan pada kota atau

kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah setelah dinyatakan sebagai provinsi termiskin kedua di pulau jawa.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan

### B. Populasi dan Sampel

Populasi menurut (Sugiyono, 2019) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu populasi secara umum dan populasi target. Populasi secara umum adalah pemerintah kota dan kabupaten di pulau jawa dan populasi target pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dan mendapatkan sampel sebanyak 35 pemerintah kota atau kabupaten.

### C. Definisi Operasional Variabel

#### 1. Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ )

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar daerahnya bisa melakukan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Menghitung pendapatan asli daerah pada penelitian ini menggunakan skala nominal dengan melihat nominal pendapatan asli daerah pada laporan realisasi anggaran pemerintah kota atau kabupaten.

#### 2. Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ )

Dana alokasi khusus merupakan salah satu dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah tersebut yang sesuai dengan pembangunan nasional. Menghitung dana alokasi khusus pada penelitian ini menggunakan skala nominal dengan melihat nominal dana alokasi

khusus pada laporan realisasi anggaran pemerintah kota atau kabupaten.

#### 3. Dana Alokasi Umum ( $X_3$ )

Dana alokasi umum termasuk dalam salah satu dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan membantu mendanai meratakan kemampuan keuangan tiap daerah sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi. Menghitung dana alokasi umum pada penelitian ini menggunakan skala nominal dengan melihat nominal dana alokasi umum pada laporan realisasi anggaran pemerintah kota atau kabupaten.

#### 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan pengukuran suatu organisasi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya. Menghitung variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah dengan skala rasio yang rumusnya sebagai berikut:  
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Alasannya dipilih rasio efisiensi keuangan daerah untuk dapat menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah karena rasio tersebut bisa menggambarkan perbandingan antar besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kriteria rasio efisiensi kinerja keuangan dijelaskan oleh (Mahsun, 2012) sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
100% keatas	Efektif
100%	Efektif berimbang
Kurang dari 100%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun (2012)

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Structural Equation Model (SEM)* dengan analisis *Partial Least Square (PLS)* dengan alat *SmartPLS*. Ada tiga pengujian yang dilakukan yaitu analisa *outer model*, analisa *inner model*, dan uji hipotesis. Analisa *outer model* dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *cronchbach alpha* dan

*composite reliability*. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) menjelaskan bahwa jika nilai *cronchbach alpha* dan *composite reliability* > 0,70 maka variabel dinyatakan reliabel. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) dalam pengujian *convergent validity* dilakukan dengan menilai *outer loading* diharapkan nilainya > 0,70 dengan begitu data dinyatakan valid. Pengukuran *discriminant validity* dengan cara melihat *cross loading* dan pengukuran *square root of average variance extracted (AVE)* harus lebih besar dari 0,50 analisa *inner model* menurut (Ghozali & Latan, 2015) dapat dilakukan dengan *R-Squares (R<sup>2</sup>)* untuk konstruk dependen. Menilai *R-Square* ada tiga macam yaitu 0.75, 0.50, 0.25 yang artinya bahwa 0.75 berarti model kuat 0.50 berarti model *moderate* 0.25 berarti model lemah. Uji hipotesis digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen secara terpisah. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan sebesar ( $\alpha$ ) = 5% sehingga:

1. Jika nilai p value >  $\alpha$ , maka H<sub>0</sub> gagal ditolak dan H<sub>a</sub> ditolak.
2. Jika nilai p value <  $\alpha$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Indikator yang dikatakan reliabel harus memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* > 0,70 berikut ini merupakan nilai masing masing variabel pada penelitian ini:

**Tabel 2.** Uji Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Ket.
X1	1,000	1,000	Reliabel
X2	1,000	1,000	Reliabel
X3	1,000	1,000	Reliabel
Y	1,000	1,000	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* pada penelitian ini sebesar 1,000 yang mana itu melewati batas minimum yaitu >

0,70 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini reliabel.

##### 2. Uji Convergent Validity

Uji *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* dan nilai *average variance extracted (AVE)*. Nilai minimum pada masing masing variabel agar dikatakan valid adalah > 0,70 untuk *outer loading* dan > 0,50 untuk *average variance extracted (AVE)*. Berikut ini merupakan nilai *outer loading* pada masing masing variabel penelitian:

**Tabel 3.** Uji Convergent Validity

	X1	X2	X3	Y
X1	1,000			
X2		1,000		
X3			1,000	
Y				1,000

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* masing masing variabel memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga mendapatkan nilai sebesar 1,000 pada tiap variabelnya. Berikutnya *nilai average variance extracted (AVE)* pada masing masing variabel penelitian:

**Tabel 4.** Nilai AVE

	AVE
X1	1,000
X2	1,000
X3	1,000
Y	1,000

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai AVE pada penelitian ini memenuhi kriteria maka dapat dikatakan bahwa variabel pada penelitian ini valid dan telah memenuhi uji *convergent validity*.

##### 3. Uji Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *cross loading* dengan kriteria yaitu nilai *loading* yang diukur lebih besar dibanding nilai *loading* ke konstruk lain. Berikut ini merupakan nilai *cross loading* pada masing masing variabel penelitian:

**Tabel 5.** Uji Discriminant Validity

	X1	X2	X3	Y
X1	1,000	0,882	0,765	-0,108
X2	0,882	1,000	0,843	-0,209
X3	-0,108	-0,209	1,000	-0,096
Y	0,765	0,843	-0,096	1,000

Sumber: Data Diolah dengan SmartPLS (2023)

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* masing masing variabel memiliki nilai yang lebih besar dibanding variabel lainnya dan telah memenuhi persyaratan maka dapat disimpulkan bahwa variabel valid.

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut nilai koefisien determinasi pada penelitian ini:

**Tabel 6.** Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Y	0,107	0,081

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023)

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Y (kinerja keuangan pemerintah daerah) memiliki nilai 0,107 (10,7%) yang artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum mampu mempengaruhi variabel Y sebesar 10,7% sedangkan sisanya 89,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 5. Uji Hipotesis

Menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan prosedur *bootstrapping* dan dengan melihat *p value*. Nilai *p value* yang dapat diterima adalah  $<0,05$  jika *p value* memiliki nilai diatas  $>0,05$  maka hipotesis tersebut ditolak. Berikut ini merupakan nilai *p value* pada penelitian ini:

**Tabel 7.** Uji Hipotesis

	<i>P Value</i>	Hasil
X1	0,223	Ditolak
X2	0,692	Ditolak
X3	0,020	Diterima

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023)

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan hanya satu hipotesis yaitu  $X_3$  yang bisa diterima karena nilainya dibawah  $<0,05$  sedangkan dua sisanya ( $X_1$  dan  $X_2$ ) ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 6. Hasil Interpretasi Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Jawa Tengah dilakukan menggunakan dengan uji *p value* dalam metode pengujian *pls* dengan menggunakan bantuan *software smartPLS* diperoleh hasil berikut:

- a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p-value* 0,223 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi yang menunjukkan  $0,223 > 0,05$  Dapat disimpulkan variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ( $H_1$ ) ditolak. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pendapatan asli daerah pemerintah kota atau kabupaten jawa tengah tidak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p-value* 0,692 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi yang menunjukkan  $0,692 > 0,05$  Dapat disimpulkan variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ( $H_2$ ) ditolak. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c) Pengaruh dana alokasi umum terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *p-value* 0,020 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikansi yang menunjukkan

0,020 < 0,05 Dapat disimpulkan variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis (H3) diterima. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pada keuangan pemerintah daerah.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menghitung kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah dan banyak pemerintah kota dan kabupaten yang mendapatkan nilai dibawah satu yang mana hal ini menandakan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berimbang. Pemerintah daerah harus menganggarkan ulang anggarannya karena pemerintah kota dan kabupaten yang mendapatkan nilai dibawah satu memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam anggaran pendapatan daerahnya dan anggaran belanjanya. Hipotesis yang tidak diterima ini juga tidak bisa menjelaskan mengenai teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) dimana agen atau pemerintah kota atau kabupaten yang menyelenggarakan pemerintahan bertanggung jawab kepada *principal* atau masyarakat tetapi pada kenyataannya agen kurang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini karena agen selaku penyelenggara tidak bisa menyesuaikan anggaran belanja dan anggaran pendapatan pemerintahnya. Agen seharusnya bisa mengevaluasi anggaran belanja yang dianggarkan tiap tahun agar ada penyesuaian antara anggaran pendapatan dan belanjanya sehingga tidak terdapat *gap* yang terlalu jauh diantara keduanya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Verawaty et al (2020) yang mana variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin & Hastuti (2020)

yang mendapatkan pengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Astarani & Pratika (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus dialokasikan dengan melihat kriteria umum yaitu penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Melihat kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak efisien dikarenakan pendapat asli daerah dan belanja daerah yang tidak berimbang. Penganggaran perlu diperhatikan dalam tiap tahunnya karena hal tersebut juga akan memberikan efek kepada hal lainnya terutama anggaran dana alokasi khusus yang didapatkan dari pemerintah pusat. Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) yang dikaitkan dengan penelitian ini belum bisa menjelaskan karena pemerintah pusat dalam hal ini selaku *principal* dan pemerintah kota atau kabupaten selaku *agen*. Dana alokasi khusus merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu mengurangi kesenjangan antar daerah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al (2020) dimana dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Machmud & Radjak (2018) dimana dana alokasi khusus juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ardhana, 2023) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan

pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang dalam pengelolaannya pemerintah daerah berwenang dalam menentukan pemakaiannya jika pengunannya bisa maksimal maka dana transfer ini bisa membantu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) pemerintah pusat selaku *principal* dan pemerintah kota atau kabupaten selaku agen. Pemerintah kota atau kabupaten disini mendapatkan dana bantuan dari pusat berupa dana alokasi umum yang mana dana ini digunakan untuk menyamaratakan dan mengejar ketinggalan antar daerah. Pemerintah pusat memberikan dana ini dalam membantu menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah lebih leluasa dalam menggunakan dana alokasi umum, pemerintah daerah bisa memilih sendiri mau dialokasikan ke bagian apa tidak seperti dana alokasi khusus yang penggunaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal itu juga yang membuat dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena bisa digunakan dengan bebas dan pemerintah daerah mengerti bagian mana saja di daerahnya yang perlu dapat alokasi dana lebih untuk pembangunan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah & Halmawati (2021) yang menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al (2020) yang menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud & Radjak (2018) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan jika melihat anggaran pendapatan dan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah memiliki

perbedaan yang sangat jauh perbandingannya. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dan alokasi khusus yang penggunaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kota atau kabupaten Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dana alokasi umum memiliki sifat penggunaan yang fleksibel sehingga memungkinkan bagi pemerintah kota atau kabupaten dalam meranggarkan penggunaannya secara maksimal karena pemerintah kota atau kabupaten bisa menggunakan dana alokasi umum ini dalam mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek dengan daerah lain sehingga dengan begitu kinerja keuangan di daerah bisa meningkat.

##### B. Saran

Pemerintah daerah harus mengevaluasi tiap tahun mengenai anggaran belanja dan anggaran pendapatan daerahnya agar tidak ada ketimpangan dalam anggaran pendapatan yang sudah dianggarkan dan anggaran belanjanya. Pemerintah daerah juga harus bisa memaksimalkan dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat agar bisa mengatasi kekurangan di daerahnya. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan nilai rasio lain untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah karena menghitung kinerja keuangan tidak terbatas hanya satu rasio saja untuk itu bisa menggunakan rasio lain.

##### DAFTAR RUJUKAN

- Ardhana, M. A. (2023). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. *MARS Journal*, 3(1), 84-105. <https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars>
- Astarani, D., & Pratika, H. (2022). Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 37-50.
- Dwi, C., Wahidahwati, & Suryono, B. (n.d.). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana

- Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Febriyanti, E. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 7, 629–637.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least square: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smart PLS 3.0*.
- Indah, B., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999, Pub. L. No. 22, Sekretariat Negara (1999).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 33 Tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004, Pub. L. No. 33, Sekretariat Negara (2004).
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, Pub. L. No. 58 (2005).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014, Pub. L. No. 23, Sekretariat Negara (2014).
- Isna, T. (2022, April 4). *Jateng Disebut Provinsi Termiskin di Jawa, Ganjar Beri Tanggapannya*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/jateng/read/4929446/jateng-disebut-provinsi-termiskin-di-jawa-ganjar-beri-tanggapannya>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2, 1.
- Nurkhayat, A., Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2018). *Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia*. 10(1), 35–47.
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan di Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Verawaty, Puspanita, I., Nurhidayah, & Kemala Jaya, A. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 21–37.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). The Influence Of Original Local Government Revenue, Fiscal Balance Transfer And Capital Expenditure On The Financial Performance Of Local Government Of Regencies And Cities In West Java Province. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Wardoyo, U., Rafiansyah, R., & Hanggoro, T. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 1(1).